



WALI KOTA METRO

- Yth.
1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
 2. Kepala Bagian Sekretariat Daerah

SURAT EDARAN

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA MELALUI
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH

- Dasar
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Presiden 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- a. Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Metro dimaksud adalah Peraturan Wali Kota Metro.
- b. Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Metro yang akan melaksanakan pembentukan Peraturan Wali Kota Metro harus mengajukan usulan perencanaan program pembentukan Peraturan Wali Kota Metro.
- c. Usulan perencanaan program pembentukan Peraturan Wali Kota Metro memuat uraian/materi pokok sesuai format dan contoh pengisian lampiran I.

- d. Usulan perencanaan program pembentukan Peraturan Wali Kota Metro disampaikan melalui Bagian Hukum Setda Kota Metro pada bulan April dan September.
- e. Selanjutnya usulan perencanaan program pembentukan Peraturan Wali Kota Metro akan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Metro.
- f. Perangkat Daerah dapat melakukan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota Metro setelah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Metro tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Metro.
- g. Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Metro membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Metro dengan susunan :
 - Ketua : Kepala Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa
 - Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - Anggota : Sesuai dengan kebutuhan
- h. Rancangan Peraturan Wali Kota Metro disertakan penjelasan atau keterangan penyusunan Peraturan Wali Kota Metro yang menjadi syarat untuk mengajukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi serta fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Metro kepada Biro Hukum Provinsi Lampung sesuai format lampiran II.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam perencanaan serta penyusunan Peraturan Wali Kota

Ditetapkan di Metro
pada tanggal... 12 Agustus 2024



LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN WALI KOTA METRO
 NOMOR 20 TAHUN 2024
 TENTANG PERENCANAAN DAN
 PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA
 MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN KEPALA DAERAH

A. FORMAT USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

| NO | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAKSANAAN | DISERTAI PENJELASAN ATAU KETERANGAN | UNIT/INSTANSI TERKAIT | KET |
|----|---------|--------------|--------|------|-------------|---|--------------------------|-----|
| | | | BARU | UBAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Judul Peraturan Wali Kota
- Kolom 3 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Wali Kota
- Kolom 4 : Penyusunan status Peraturan Wali Kota dengan memilih apakah Peraturan Wali Kota baru dibuat atau Peraturan Wali Kota perubahan
- Kolom 5 : Aturan yang mendasari perlunya disusunya Peraturan Wali Kota apakah delegasi atau atribusi dalam pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah
- Kolom 6 : Penyusunan Peraturan Wali Kota apakah disertai penjelasan atau keterangan penyusunan Peraturan Wali Kota
- Kolom 7 : Perangkat Daerah/Unit Kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Wali Kota
- Kolom 8 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Wali Kota



KEPALA OPD PEMRAKARSA

ttd

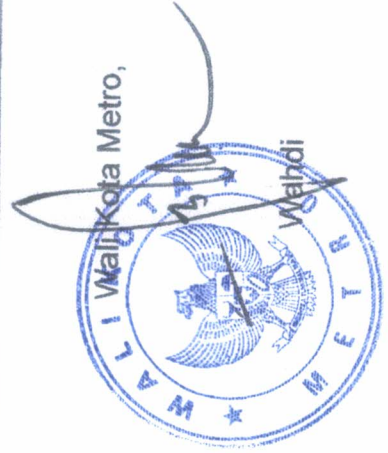
NAMA
 NIP

**B. CONTOH PENGISIAN FORMAT USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

| NO | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAKSANAAN | DISERTAI PENJELASAN ATAU KETERANGAN | UNIT/INSTANSI TERKAIT | KET |
|----|--|---|--------|----------|------------------------------------|--|--------------------------|-----|
| | | | BARU | UBAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Metro | 1. Asas dan tujuan 2. Tugas dan wewenang 3. Rencana aksi 4. dst. | √ | Delegasi | Penjelasan/keterangan terlampir | 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial 3. dst. | | |

KEPALA OPD
PEMRAKARSA
ttd

NAMA
NIP



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN WALI KOTA METRO
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PERENCANAAN DAN
PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA
MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH

KERANGKA KETERANGAN ATAU PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
HALAMAN JUDUL

Memuat nama rancangan, penyusun (Perangkat Daerah) dan tahun pembuatan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
memuat argumentasi mengapa pembentukan rancangan peraturan wali kota menggunakan kajian keterangan/penjelasan.
- B. Identifikasi Masalah
memuat rumusan mengenai masalah apa yang ada di perangkat daerah dan diuraikan (merupakan pilihan masalah yang akan diselesaikan melalui perwali)
- C. Dasar Hukum
memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan atau menjadi dasar kewenangan pembentukan perwali

BAB II

POKOK PIKIRAN DAN MATERI MUATAN

- A. Pokok Pikiran
sasaran memuat pokok permasalahan yang akan diatur dengan peraturan walikota, jangkauan memuat pihak pihak yang akan terdampak dengan rancangan peraturan walikota, arah pengaturan memuat keadaan yang ingin dicapai dengan norma yang ada di rancangan peraturan wali kota
- B. Ruang Lingkup Materi Muatan
memuat pokok pengaturan yang akan dituangkan dalam BAB yang ada di rancangan Peraturan Wali Kota

BAB III

KESIMPULAN

memuat rangkuman pokok pikiran yang pada prinsipnya membutuhkan pembentukan peraturan Walikota.

KEPALA OPD PEMRAKARSA

ttd

NAMA
NIP

